

Implementasi Gerakan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Lembaga Anti Korupsi di Propinsi Jawa Timur

Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah

Universitas Negeri Surabaya

emmiliarusdiana@unesa.ac.id, nurulhikmah@unesa.ac.id

Abstrak

Gerakan antikorupsi mencoba ditanamkan sejak dini sekaligus mengenalkan kepada masyarakat bahwa upaya pencegahan sangatlah lebih baik daripada upaya penanggulangan tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini telah dilakukan oleh lembaga pemerhati antikorupsi yang mewakili masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengalaman dan pemahaman dalam mendukung dan mewujudkan gerakan anti korupsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada masyarakat Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Malang Corruption Watch (MCW) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung Jawa Timur telah mengimplementasikan gerakan anti korupsi dengan fokus kerja pada pendidikan publik dan peningkatan kapasitas pemuda dan mahasiswa serta telah melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan mengadakan pemantauan sidang khusus perkara tipikor.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi; gerakan anti korupsi; masyarakat Jawa Timur

Abstract

The anti-corruption movement introduces the publik that prevention efforts are better than efforts to eradicate corruption itself. This case has been conducted by an anti-corruption activist representing the community. The purpose of this research is to know the experience and understanding in supporting and realizing the anti-corruption movement as an effort to prevent corruption in East Java society. This type of research is sociological juridical and analyzed qualitatively. The results of the discussion showed that Malang Corruption Watch (MCW) and the Judicial Commission of the Republik of Indonesia liaising East Java had implemented an anti-corruption movement with a focus on publik education and capacity building for youth and students and had exercised their authority and duties in realizing judges who were committed to implementing the Code of Ethics and the Judge's Conduct Guidelines (KEPPH) by monitoring special hearings on corruption cases.

Keywords: corruption; anti-corruption movement; East Java community

PENDAHULUAN

Sebagian pendapat ahli menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia turut bertanggung jawab atas kemerosotan moral. Salah satunya adalah dengan penerapan pendidikan karakter yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Sistem Pendidikan (KTSP). masalahnya adalah Peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar tujuh jam per hari. atau kurang dari 30%. Selebihnya (70%). peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu. pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik. Pendidikan yang hanya menekankan unsur kognitif tanpa mengedepankan unsur afektif maka akan memunculkan perbuatan korupsi.

Salah satu penyebab semakin meningkatnya perbuatan korupsi adalah ketiadaan perbuatan yang dapat diteladani sebagai perbuatan yang baik. Hal tersebut dimulai saat

seseorang berada dalam lingkungan keluarga. Perbuatan baik merupakan wujud dari integritas. Penguatan integritas ini menjadi kajian khusus yang penting untuk diteliti. Hal ini mengingat bahwa visi dan misi seseorang dipengaruhi oleh karakter. Karakter tersebut sebagian besar bersumber dari prinsip dan budaya yang ada dalam lingkungan keluarga. dan prinsip itu sebagian besar bersumber dari prinsip agama yang dianutnya. Jadi. Pendidikan keluarga adalah pihak yang paling berperan dalam mewujudkan anggota keluarganya untuk mendekati perbuatan korupsi atau tidak.

Dampak atas ketiadaan unsur afektif adalah rendahnya integritas. Integritas adalah mutu. sifat. atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran¹. Integritas adalah kata yang lebih dikenal saat *fit and proper* seseorang untuk mencapai suatu jabatan strategis di Indonesia. tetapi belum menjadi pertimbangan

¹ Kbbi. Integritas. <https://kbbi.web.id/integritas> diakses tanggal 27 Oktober 2017..

untuk hal yang lain. Maksudnya adalah integritas merupakan satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk mencegah perbuatan korupsi dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Jadi integritas tidak hanya kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. tetapi juga antara prinsip. nilai-nilai dalam masyarakat. juga hati nurani. Hati nurani adalah sesuatu yang harus ada dalam diri manusia dan salah satu yang menggerakkan alam bawah sadar. Salah satu sumber alam bawah sadar itu adalah iman yang berasal dari esensi agama atau keyakinan seseorang.

Penyebab rendahnya tingkat nasionalitas suatu masyarakat adalah kurangnya keteladanan yang seharusnya selalu didengungkan dalam masyarakat. padahal di tengah-tengah masyarakat telah terdapat kegiatan yang bersifat positif yang sarat dengan makna integritas yang disebut dengan gerakan anti korupsi. Gerakan antikorupsi telah lama didengungkan pada masyarakat sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Gerakan antikorupsi seharusnya ditanamkan

sejak dini sekaligus mengenalkan kepada masyarakat bahwa upaya pencegahan sangatlah lebih baik daripada upaya penanggulangan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengalaman dan pemahaman dalam mendukung dan mewujudkan gerakan anti korupsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada masyarakat Jawa Timur. sehingga pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pemerintah daerah serta masyarakat pada umumnya dapat mengarahkan program kerja atau kegiatan pada lembaga-lembaga masing-masing untuk melakukan penguatan gerakan anti korupsi dengan kontribusi berupa memberikan metode pengajaran dengan lebih menarik melalui pemberian contoh-contoh keteladanan dalam pembahasan materi pendidikan kewarganegaraan. pendidikan anti korupsi serta pendidikan agama pada semua jenjang pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian (empiris) yuridis

sosiologis² dan peneliti mengungkapkan penelitian ini dengan bertumpu pada data atau fakta di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya³ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan referensi lain yang mendukung. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode *Interview* (wawancara) atau kuesioner lisan secara tidak terstruktur adalah wawancara bebas kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif⁴. Informan terdiri dari dua organisasi publik yang dikenal sebagai penggagas atau pegiat anti

korupsi. Dua organisasi tersebut adalah Malang Corruption Watch (MCW). serta dari Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung Propinsi Jawa Timur.

Informan terdiri dari pemerhati hukum yang mewakili organisasi atau wadah yang bidang kajiannya adalah bidang korupsi dan dinyatakan dapat mewakili masyarakat yakni informan dari Malang Corruption Watch (MCW) Kota Malang yaitu M. Fahrudin Andriyansyah selaku Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Bayu Diktiarsa Pratama, S.Sos. selaku Kepala Sekretariat Malang Corruption Watch (MCW) dan Eki Maulana, S.H. selaku Badan Pekerja Bidang Hukum Malang Corruption Watch (MCW)

Informan yang berasal dari Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Dizar Al Farizi selaku Koordinator Penghubung Propinsi Jawa Timur

² Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan. Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 109.

³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

⁴ Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Komisi Yudisial Republik Indonesia

b. Ali Sakdudin selaku anggota Koordinator Penghubung Propinsi Jawa Timur Komisi Yudisial Republik Indonesia

Alasan pemilihan Malang Corruption Watch (MCW)⁵ sebagai informan adalah sebagai Lembaga anti korupsi yang masih terjaga kredibilitas dan profesionalitasnya. MCW⁶ telah dipercaya mendampingi ICW (*Indonesian Corruption Watch*) dan memiliki jaringan nasional maupun internasional serta memiliki donator asing yang mempercayai Lembaga ini, sementara alasan pemilihan Komisi Yudisial Republik Indonesia⁷ (KYRI) penghubung Propinsi Jawa Timur adalah sehubungan dengan tugas dan wewenang lembaga sebagai pihak

yang bertanggung jawab mengawasi kinerja dan tugas hakim-hakim dalam lingkungan propinsi Jawa Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan informan Malang Corruption Watch adalah bahwa gagasan mendirikan Malang Corruption Watch (MCW) berawal dari komunitas diskusi yang sudah berjalan sebelum reformasi 1998. Kemudian resmi berubah menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat pada 31 Mei 2000. Hal ini terinspirasi oleh keberadaan Indonesia Corruption Watch (ICW). Adapun agenda-agenda yang dilakukan oleh MCW meliputi kegiatan monitoring, investigasi dan advokasi kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu)

⁵ Yusuf Adam Hilman¹, Herlambang Septa Nugraha. Gerakan Anti Korupsi Malang Corruption Watch. Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No. 2, Juni 2018. jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/download pdf

⁶ Fahdian Rahmandani, Samsuri, Malang Corruption Watch Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Guna Membangun Budaya Anti-Korupsi Di Daerah. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial

Budaya - Vol. 21 No. 01 (June 2019). jurnalanthropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/download

⁷ Bertin. Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/152071-ID-fungsi-pengawasan-komisi-yudisial-terhad.pdf>.

termasuk juga melakukan kampanye dan pendidikan publik. Seluruh agenda kerja MCW lebih diarahkan untuk menjadi gerakan moral dan gerakan sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya MCW diharapkan dapat mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradab, humanis dan berdaulat. MCW merupakan lembaga independen. Untuk mendukung kegiatannya, MCW menggunakan dana yang berasal dari usaha mandiri dan donatur. Untuk menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan, MCW tidak bisa menerima dana dari pemerintah atau institusi negara, parpol dan lembaga sosial maupun ekonomi yang berafiliasi dengan parpol. Artinya, MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau.

Visinya adalah terciptanya masyarakat madani yang humanis, beradab, bermartabat dan berdaulat dengan mengupayakan terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi dan hukum yang bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme. Dengan misi adalah melakukan monitoring dan investigasi kasus korupsi serta melakukan pendidikan publik untuk membangun gerakan sosial anti korupsi melalui pembentukan zona-zona anti korupsi

MCW merupakan lembaga independen. Dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan MCW berasal dari usaha mandiri dan donatur. Dalam menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan, MCW tidak menerima dana dari pemerintah atau institusi negara, parpol dan lembaga sosial maupun ekonomi yang berafiliasi dengan parpol. Artinya, MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau. Secara sederhana, MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau. Saat ini MCW memiliki sekretariat yang beralamatkan di Jalan Joyosuko Metro No 42 A, Merjosari, kota Malang Jawa Timur.

Pembahasan mengenai fokus kerja pada Malang Corruption Watch (MCW) pada lima hal yakni : advokasi pelayanan publik, pendidikan publik, advokasi

kebijakan publik dan korupsi politik, advokasi dan monitoring kasus korupsi, dan peningkatan kapasitas pemuda dan mahasiswa. Data penelitian adalah pada rentang dua tahun yakni tahun 2016 dan tahun 2017. Gerakan anti korupsi berupa pencegahan yang terjadi pada MCW adalah dimulai saat akhir tahun 2017 bahwa MCW telah memiliki **14 forum warga** yang terus dilakukan pendampingan untuk penguatan pengetahuan. Selain melalui forum warga, MCW juga memiliki program pendidikan “**Sekolah Rakyat**” yang diperuntukkan masyarakat Malang Raya secara luas. Selain dilakukan oleh Malang Corruption Watch, Pendidikan Publik juga dilaksanakan oleh aktor warga yang tersebar di 3 wilayah yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Pendidikan publik ini adalah hasil dari keseriusan warga yang bersama-sama dengan MCW mencoba melakukan perubahan dengan membuat program yang dimulai dari adanya proses transformasi pengetahuan melalui “**Sekolah Rakyat**” yang dikelola oleh warga dan dalam kegiatan sekolah rakyat juga

diikuti dengan adanya **interaksi ekonomi melalui koperasi** yang hingga saat ini sudah mencapai satu tahun setengah dan dengan perputaran dana lebih dari 30 jutaan.

Hasil dari pendidikan publik MCW dengan didukung oleh warga sekolah rakyat ini telah memberikan trigger (pemicu) sehingga mulai ada kelompok masyarakat yang berani menyampaikan kepada hadapan publik tentang kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya. Salah satunya adalah **kelompok yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli pendidikan (FMPP)**, yang didirikan oleh seorang Ibu yang sangat peduli atas nasib anak-anak negeri yang tak mampu membiayai sekolahnya yang didukung oleh para relawan antikorupsi MCW pada tahun 2006, yang hingga saat ini tetap konsisten memperjuangkan hak pendidikan warga negara yang bebas pungutan liar (pungli). Bahkan saat ini FMPP sangat diperhitungkan oleh para pengambil kebijakan di bidang pendidikan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kelompok kedua di Kota Batu, yakni munculnya kelompok

masyarakat yang mempunyai sikap yang jelas ketika ada kebijakan di bidang lingkungan. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam melakukan pekerjaan advokasi baik yang di medan peradilan maupun medan politik melalui gerakan massa yang hingga ribuan jumlah dan hingga saat ini masih tetap konsisten dan solid. Dalam ranah peradilan bahkan kelompok masyarakat ini menang atas nama keadilan rakyat melawan kepongahan korporasi dan penguasa yang tidak bertanggungjawab atas kelestarian lingkungan hidupnya di Kota Batu. FMPP dan kelompok peduli lingkungan di Kota Batu memiliki arah yang jelas dalam melakukan kegiatan advokasinya yaitu menggunakan jalan konfrontasi dengan argumentasi bahwa negara dan pemerintah telah abai terhadap kewajibannya yang harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun yang terjadi adalah malah sebaliknya, yaitu, negara selalu absen ketika rakyat membutuhkan perannya dalam menjalankan fungsinya, namun negara selalu hadir tatkala meminta dan memungut materi, sumberdaya sosial dan

ekonomi (uang) yang berbentuk pajak dan retribusi.

Kelompok-kelompok warga yang lain baik yang didorong atau diinisiasi oleh MCW maupun oleh lembaga lain yang kemudian mempunyai kesamaan visi untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap praktik kotor yang dilakukan oleh para pemegang mandat kekuasaan. Kelompok-kelompok tersebut ada yang berwujud formal seperti organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat seperti Forum Masyarakat Peduli Malang (FMPM) yang mempunyai fokus pada isu kesehatan, **Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya**, yang terdiri dari gabungan lembaga maupun individu baik yang berasal dari kalangan kampus, aktivis NGO maupun individu masyarakat. Saat ini juga mulai tumbuh forum-forum warga yang solid, yang bekerja mengawasi seperti masalah PDAM, Listrik, Kartu Identitas, BPJS, dan masalah-masalah lainnya.

Timeline pendidikan publik untuk perubahan social ini merupakan ruh gerakan anti korupsi yang dibangun oleh MCW. Dalam

melakukan pendidikan publik yang melibatkan warga, MCW menggunakan metode **diaspora gerakan**, yaitu MCW selalu mendorong orang yang telah dipengaruhi, dididik dan difasilitasi (aktor/warga) untuk tumbuh menjadi penggerak-penggerak massa di wilayahnya. Instrumen utama yang dipakai dalam kerja pendidikan publik adalah forum warga. Dalam forum warga inilah, proses fasilitasi, penyadaran, dan peningkatan kapasitas warga dilakukan, demikian pula proses perluasan jaringan kelompok warga. Pembentukan Kelompok-kelompok warga yang dilakukan oleh MCW dan aktor warga ditingkat RT/RW/desa/kelurahan/kecamatan (*grass roots*) merupakan sarana yang dianggap efektif untuk mendiaspora gerakan. Sejauh ini kelompok-kelompok warga yang menjadi bagian dalam aras gerakan MCW di Malang Raya adalah seperti tercantum dalam tabel berikut:

No	Sektoral/resi densial	Forum Warga		
		2015	2016	2017
1.	Klojen	1	0	0

2.	Sukun	5	4	4
3.	Kedungkandang	5	5	4
4	Blimbing	2	0	0
5	Lowokwaru	1	3	3
6	Komunitas	2	1	2
7	Batu	1	1	2
8	Kabupaten Malang	0	2	3
	Jumlah	17	16	18

Dengan pembagian kelompok warga berbasis pada fokus materi advokasi masing adalah:

Status perkembangan	Jumlah
Melakukan advokasi kasus pendidikan (pendampingan kasus) serta terus mengampanyekan isu antikorupsi	8 kelompok warga
Mengkritisi kinerja pelayanan publik	1 kelompok warga
Meningkat kapasitas dan pengetahuan	9 kelompok warga

Pengorganisasian aktif lainnya juga dilakukan oleh MCW yakni terhadap **aktor-aktor warga**. Ada 10 orang aktor warga yang tersebar di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Aktor warga ini berperan sebagai Community Organizer yang disingkat CO atau pengorganisir warga. CO warga bekerja sama dengan CO MCW untuk melakukan kegiatan pendidikan publik bagi

warga secara umum khususnya yang berada di wilayah sekitar tempat tinggal CO warga yang bersangkutan. CO warga Sukun misalnya, mendapatkan mandate dari MCW, berdasarkan kesepakatan bersama, untuk melakukan pengorganisirian (mengadakan pertemuan untuk belajar) dan sekaligus menjadi petugas penerima pengaduan warga di wilayah dia tinggal. Berikut ini adalah grafik intensitas pertemuan kelompok warga selama tahun 2015 yang dilakukan oleh MCW bersama dengan CO warga.

Agenda lainnya adalah membangun kemandirian pelembagaan gerakan sosial melalui **sekretariat bersama dan koperasi**. Melalui koperasi pendidikan politik warga dilangsungkan. Porsi pertemuan koperasi dan pendidikan koperasi dilakukan bersamaan. Yaitu 1 bulan 1 kali, 40 persen digunakan untuk membahas perkembangan koperasi dan sisanya 60 persen digunakan untuk melakukan diskusi peningkatan kapasitas warga yang disebut sekolah rakyat. Skema pembagian aktivitas tersebut untuk menghidupkan kedua bentuk aktivitas

tersebut baik pendidikan koperasi maupun koperasi warga. Koperasi komunitas Kalimetro berdasarkan data pengelolaan keuangan dan pengelolaan forum diskusinya menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Jumlah anggota sebanyak 83 orang, dengan uang yang berputar sebesar 46 juta. Skema tersebut pada tahun 2014 sudah mulai dikembangkan pada komunitas forum PKK Muharto, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Komunitas tersebut sudah mulai mengembangkan pengelolaan koperasi sesuai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di komunitas. Pada tahun 2016 kembali terbentuk koperasi baru, yaitu koperasi pejuang buruh dengan anggota 53 orang. dengan modal awal yang terhimpun sebesar 26 juta. Pada akhirnya koperasi komunitas akan menjadi satu kekuatan ekonomi gerakan politik bagi masyarakat sipil di Malang Raya. Dimana pada titik tertentu skema penguatan ekonomi dalam membangun kekuatan politik masyarakat sipil akan semakin memperkuat posisi tawar masyarakat sipil Malang Raya sebagai kelompok

penekan (pressure group) terhadap struktur kekuasaan (pemerintah).

Agenda gerakan anti korupsi yang tetap dilakukan oleh MCW adalah dengan **memotret potensi korupsi pada daerah-daerah di Provinsi seluruh Jawa Timur**. Tujuan dari potret potensi korupsi di daerah ini adalah menunjukkan bahwa bahwa rakyat tidak mendapatkan perubahan kondisi yang lebih baik secara signifikan positif. Rakyat hanya terus menerus disuguhi drama kekurangan pendapatan yang berujung pada peningkatan tarif pajak padahal penyebabnya bukan soal besar kecilnya tarif pajak. Latennya praktik-praktik koruptif adalah penyebab dari tidak sejahterahnya rakyat negeri ini.

Agenda efektif lainnya atas gerakan anti korupsi adalah menguatkan jaringan anti korupsi. Selain tergabung dalam jaringan anti korupsi nasional, dalam lingkup regional Jawa Timur Malang Corruption Watch (MCW) diminta untuk menjadi **sekretariat jaringan anti korupsi di Jawa Timur**. Terdapat beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung

dalam koalisi bersama, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Jawa Timur (Kontras Jatim), Wahana lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi Jatim), KRPK Blitar, Irdes Situbondo, PUSKAP Madiun, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Parliament Watch, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (PUSHAM UBAYA), dan lain-lain. Dalam lingkup lokal Malang Raya, Malang Corruption Watch berjejaring dengan Intrans Institute, LPKP, PPOTODA, SPAK, FLAC, dan lain-lain. Jaringan antikorupsi di atas terus bergerak dan saling berkoordinasi antar daerah, dengan harapan koordinasi yang dilakukan dapat menjadi media untuk mendorong agenda pemberantasan korupsi berbasis gerakan rakyat, sehingga tidak ada alasan dan kekhawatiran bahwa gerakan mereka hanya sendiri, tetapi mereka mempunyai dukungan dari jaringan antikorupsi Jatim. Koordinasi antar jaringan paling tidak bisa menjadi

senjata ampuh untuk menyusun strategi advokasi, jika di satu daerah melakukan advokasi kebijakan namun terganjal oleh sistem birokrasi yang tidak mendukung, maka jaringan antikorupsi Jatim bisa memberikan dukungan dengan melakukan upaya advokasi di tingkat provinsi atau tingkat nasional. Pada tahun 2016, MCW bersama jaringan telah melakukan berbagai macam gerakan, di antaranya:

1. Gerakan bersama menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Gerakan bersama Advokasi Sumberdaya Alam di Jawa Timur. Yaitu dengan mendorong pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melakukan moratorium terhadap pemberian izin terhadap usaha pertambangan.
3. Gerakan bersama melakukan kampanye anti korupsi
4. Gerakan bersama dalam melakukan monitoring dan Advokasi di Wilayah kerja masing-masing.
5. Melakukan Advokasi terhadap kriminalisasi petani sengan di Blitar.

Agenda anti korupsi yang telah digagas oleh MCW adalah dengan melakukan aksi turun jalan melibatkan kaum intelektual yakni pada tahun 2016, MCW bersama-sama dengan Kaum intelektual melakukan berbagai macam kajian dan gerakan untuk mendorong gerakan anti korupsi. diantaranya:

- a. Melakukan Aksi bersama mencabut mandat DPR-RI, hal tersebut dilakukan sebagai respon terhadap adanya potensi pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK.
- b. Melakukan Kajian dan Advokasi Bersama terhadap Persolan mantan 77 burun PT Indonesia Tobacco Malang
- c. Melakukan Kajian dan Avokasi bersama terhadap kriminalisasi petani sengan di Blitar
- d. Melakukan Kajian dan Advokasi bersama terhadap Indikasi Korupsi yang terjadi di Malang Raya
- e. Melakukan Kajian dan Advokasi bersama terhadap Perda retribusi Umum Kota Malang (terutama terkait dengan retribusi parkir.

Agenda penting lainnya adalah melibatkan pemuda sebagai ujung tombak perubahan yakni dengan :

- a. Mengadakan kegiatan *Goes to campus* di beberapa kampus di Malang Raya, misalnya di Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Tribuwana Tugga Dewi, Universitas Brawijaya, Universitas Merdeka dan beberapa kampus lainnya. Selain itu MCW juga terlibat aktif memfasilitasi ruang-ruang diskusi untuk mentransformasikan pengetahuan mengenai gerakan antikorupsi.
- b. Bersama-sama melakukan pengorganisasian, di antaranya mengorganisir PKL Mondoroko, 77 mantan Buruh PT Indonesian Tobacco, Mengorganisir Petani di Blitar, dan melakukan pengorganisasian terhadap warga dampingan MCW yang tersebar di Malang Raya.
- c. Melakukan Kampanye secara masif di media sosial sebagai salah satu instrumen untuk mendekatkan isu anti korupsi.

- d. Bersama-sama melakukan monitoring dan advokasi terhadap indikasi kasus korupsi yang ada di Malang Raya
- e. Membentuk Relawan Pilkada Batu, yaitu dengan melakukan riset terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam proses pemilu dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Batu. dimana anggotanya terdiri dari mahasiswa lintas kampus dan lintas organisasi mahasiswa.

Peluang **bekerjasama dengan berbagai organisasi mahasiswa** bertujuan sebagai kegiatan bersama untuk menambah jaringan di kelompok mahasiswa, menyebarluaskan nilai dan gerakan sosial anti korupsi, serta mendorong gerakan mahasiswa baik organisasi atau personal dalam mengawal isu-isu yang ada. Seringkali, keterlibatan organisasi dan isu gerakan sosial memiliki kedekatan isu spesifik dengan bidang keahlian masing – masing (misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran mengenai isu Kesehatan, (Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Fakultas Pertanian mengenai isu Pertanian, dan lain-lain) atau melalui kebijakan birokrat (anggaran kampus, teknik investigasi, pelatihan advokasi, aksi, dan lain-lain). Hal ini tentu saja peluang bagi kedua belah pihak untuk menjalankan kerjasama. Pada akhirnya, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh MCW dan mahasiswa dalam mengawal kasus korupsi di Malang Raya tidak hanya berhenti di level program kegiatan saja. Berbagai upaya tindak lanjut dan pengawasan kerap dilakukan. Melalui Relawan Advokasi Pilkada di Desember 2016, Sekolah Kami Perempuan, Forum Pendidikan UM, Gebrak Polinema, Komite Aksi Kamisan, dan beberapa rencana kegiatan bersama yang masih dalam tahapan wacana seperti Forum Advokasi Petani, Kelas Anggaran, Kelas Agraria, dan ide menyatukan Komite Mahasiswa Malang Raya masih menjadi cita – cita bersama yang patut ditunggu dan diupayakan.

Agenda gerakan anti korupsi yang paling penting pada zaman milenial ini adalah **membuat pilihan gerakan MCW dalam hal kampanye publik** menjadi berbeda.

Media yang saat ini digemari untuk melakukan aktivitas kampanye tersebut cukup beragam mulai dari website, media sosial, blog, petisi online, papan informasi rakyat, hingga diskusi publik, khususnya kampanye melalui media media sosial dan internet membuahkan hasil berupa tindakan nyata, seperti kasus parkir, revisi UU KPK, anggaran mobil dinas, korupsi infrastruktur, dan berbagai kasus lainnya. Adapun beberapa sumber informasi, terdapat pada website mcw-malang.org yang berisi berbagai rilis dan suara Kalimetro yang dihasilkan oleh Malang Corruption Watch. Dari sumber itulah, berbagai turunan kampanye kreatif dihasilkan dalam bentuk poster ataupun melalui kanal lainnya. Banyaknya media yang digunakan oleh Malang Corruption Watch secara umum belum dapat diukur melalui pencapaian kualitas isu yang dihasilkan dan dampak bagi publik. Namun respon yang beragam mampu dihasilkan oleh berbagai media tersebut, sesuai dengan segmentasi yang ada. Secara umum, respon publik banyak tersebar melalui

facebook dan tayangan ATV dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Inovasi dilakukan oleh Malang Corruption Watch, **melalui petisi, variasi aksi dan diorama mobil dinas, istighosah bersama, nonton film anti korupsi**, dan memulai untuk bekerja sama dengan berbagai komunitas seni dan teater dalam hari anti korupsi silam merupakan upaya yang dapat ditindaklanjuti dalam agenda pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu bagian skema advokasi non-litigasi, kampanye publik menjadi salah satu peran penting dalam kemajuan organisasi.

MCW tidak menerima dana dari pemerintah atau institusi negara, parpol dan lembaga sosial maupun ekonomi yang berafiliasi dengan parpol, artinya MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau MWC, demi menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan, sehingga pengurus MCW tidak diberikan gaji bulanan dan dana pelaksanaan kegiatan MCW berasal dari usaha mandiri dan donatur. Hal inilah wujud integritas yang sebenarnya yakni adanya kesetiaan pada komitmen meskipun sebagai

bagian dari ketidaknyamanan serta wujud integritas berupa kekuatan yang tetap teguh meskipun tidak ada yang melihat.

Tahun 2017, MCW menentukan fokus kajian berupa jatim darurat korupsi: rakyat bergerak, lawan perampok uang rakyat. MCW memiliki tiga rencana strategis yang disusun oleh MCW dalam mengupayakan penguatan gerakan rakyat. Utamanya untuk mendorong gerakan anti korupsi, yaitu:

1. Tergalangnya dukungan dari publik terhadap kerja-kerja pelebagaan gerakan sosial.
2. Menguatnya pengetahuan, kemampuan dan peran kelompok warga dalam membentuk pos-pos pengaduan, zona antikorupsi dan sekretariat bersama sebagai sarana pemberian informasi dan advokasi publik
3. Terkonsolidasinya partisipasi aktif publik dan jaringan Organisasi Anti Korupsi untuk melakukan pendidikan dan kampanye publik dalam upaya melakukan pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik, politik, dan hukum dan peradilan.

Hal ini diwujudkan dengan pendidikan politik rakyat melalui **sekolah rakyat**, diikuti oleh setidaknya 10-15 warga. Sekolah rakyat didesain dengan menggunakan strategi andragogis, peserta diajak untuk menyusun kebutuhan materi. Selain itu, peserta juga diminta untuk menjadi fasilitator pada setiap tatap muka sekolah rakyat. Beberapa materi sekolah rakyat berisi tentang HAM, Pelayanan Publik, Hukum, Tindak Pidana Korupsi. Sekolah rakyat dilakukan rutin setiap bulan dalam bentuk materi dan diskusi bersama ahli dengan kajian atau analisis strategis pada kebijakan, hukum dan anggaran serta dengan metode advokasi berupa Tahap advokasi bersama dilakukan oleh warga/peserta Sekolah Rakyat berdasarkan hasil kajian dan analisis. Advokasi yang dilakukan dalam bentuk: hearing, konferensi pers, aksi, monitoring ataupun kampanye publik.

Pendidikan politik rakyat yang kedua adalah **forum warga** yakni MCW melakukan aktivitas rutin berupa forum warga yang tersebar di

berbagai wilayah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk diaspora gerakan pengorganisasian. Pada tahun 2017 Malang Corruption Watch melakukan penguatan sekaligus penambahan jumlah forum warga di Malang Raya. Forum Warga dilakukan dengan menyesuaikan agenda pada setiap forum warga. Malang corruption watch menciptakan sekretariat bersama yang didalamnya diselenggarakan pendidikan publik, monitoring dan advokasi. Dari 14 forum warga yang ada, setidaknya terdapat 8 (delapan) forum warga yang masih dalam tahap peningkatan kapasitas dan 6 (enam) sudah dalam tahap advokasi. Tabel berikut mengenai level perkembangan Forum Warga

Status perkembangan	Jumlah
Peningkatan kapasitas	8 kelompok warga
Melakukan advokasi/pendampingan kasus pelayanan publik dan gerakan anti korupsi	6 kelompok warga

Membangun kemandirian melalui **Koperasi**. Koperasi warga diharapkan mampu menjadi penopang kebutuhan ekonomi

anggota forum warga dan mampu membiayai penyelenggaraan setiap forum warga. Hingga hari ini setidaknya terdapat 4 koperasi warga: Koperasi Kalimetro, Koperasi perempuan mandiri, koperasi muharto dan koperasi setia kawan (Buruh).

Kelompok Warga mengawal Pelayanan Publik. untuk monitoring pelayanan publik dibentuklah Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) terfokus pada pemantauan dan advokasi pelayanan pendidikan. Selain itu, pada awal tahun 2017 MCW membentuk **kelompok masyarakat yang terfokus pada pelayanan kesehatan**, yaitu Forum Masyarakat Peduli Kesehatan (FMPK).

Dalam mendukung setiap aktivitas pengawalan pelayanan publik setiap kelompok warga (FMPP, FMPK) mengadakan **pos pengaduan** sebagai upaya penjangkaran informasi dari masyarakat mengenai keluhan atau permasalahan di pelayanan publik. Hasil informasi yang telah di dapatkan dari pos pengaduan akan dijadikan bahan analisis yang akan

dibawa kepada pihak terkait melalui mekanisme *hearing*.

Penguatan warga dilakukan melalui gerakan bersama rakyat dalam pencegahan korupsi. Pendidikan publik yang dilakukan oleh MCW dalam menyebarkan gerakan anti korupsi dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya melalui **kampanye anti korupsi**, kampanye publik sebagai bentuk edukasi anti korupsi kepada masyarakat secara luas juga menjadi peran penting dari nafas gerakan anti korupsi. Sebagai media alternatif, kampanye publik dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk. Diantaranya: meningkatkan efektivitas media sosial MCW sebagai alat edukasi kepada masyarakat, peningkatan media alternatif dalam membangun gerakan anti korupsi dalam bentuk bioskop warga dan pagelaran seni anti korupsi. Kegiatan ini adalah melakukan pendidikan publik kepada masyarakat melalui **bioskop warga**. Bioskop warga menjadi alternatif MCW untuk menyampaikan isu soal pelayanan publik kepada masyarakat,

melalui film-film yang sudah terklasifikasi dan dianggap bagus dan baik diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat dalam melakukan kerjasama advokasi, termasuk dalam melakukan diskusi soal pelayanan publik baik kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya. Sebagai bentuk pemberdayaan komunitas, Malang Corruption Watch (MCW) melakukan kerjasama dengan komunitas film “rollab.id” dimana distribusi film yang mendidik dan dapat menjadi motivasi warga menjadi pilihannya. Selain itu, MCW juga membuat film dokumenter soal dampak pembangunan Kota Batu kepada masyarakat. film-film ini ditayangkan bioskop warga di kota batu. Kemudian aksi warga malang secara mandiri dalam melawan korupsi adalah melalui aksi **Aksi Korupsi E-KTP**, Korupsi E-KTP menjadi salah satu kasus besar yang terjadi di Negara pada tahun 2017. Pasca ditetapkannya beberapa penyelenggara Negara yang diduga terlibat dalam penggelapan dana E-KTP, kemudian **Aksi #SaveNovelBaswedan** Pasca diungkapnya korupsi E-KTP yang

diduga melibatkan beberapa pejabat Negara terjadi intervensi dan penyerangan kepada Novel Baswedandan. Aksi Ruwatan Kota Batu: Ulang Tahun Kota Batu ke-16 Tahun. Aksi Ruwatan Kota Batu dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batu dan aksi yang dilakukan bersama masyarakat Kota Batu tersebut mengusung tema besar **“Ruwatan Kota Batu”** yang artinya membersihkan Kota Batu dari segala bentuk korupsi. Aksi **Peringatan Hari Anti Korupsi Peringatan Hari Anti Korupsi** yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) bersama masyarakat Malang Raya dilakukan terpusat di depan Balai Kota Malang. Selain ditempat tersebut, beberapa massa aksi juga melakukan pendidikan publik dalam bentuk penempelan banner di beberapa titik yang diduga terjadi korupsi. Aksi **“Politik Dinasti, Rawan Korupsi: Pesan Walikota Batu”** Aliansi masyarakat peduli Kota Batu bersama MCW melakukan aksi damai dalam merespon pelantikan wali Kota Batu.

Dunia Digital Menjadi Arus Utama Informasi. Media sosial

merupakan salah satu sarana alternatif dalam publikasi aktivitas MCW dan sumber data sekunder. Melalui **media sosial** masyarakat dapat mengakses dan mengetahui lebih luas tentang aktivitas/kegiatan MCW. Berikut beberapa kanal yang dimiliki oleh MCW yakni mcw-malang.org sebagai website, akun Malang Corruption Watch pada Facebook, @mcwngalam pada Twitter dan @mcwngalam pada Instagram, dan MCW Malang / @hhj2245s pada Line Official. Selain melalui media sosial, MCW juga melakukan kampanye melalui berbagai aktivitas. Di antaranya: aksi kreatif, pembuatan video dokumenter, aksi solidaritas, pemutaran film, serta terus menjalin komunikasi aktif dengan beberapa komunitas teater dan seni.

Anti Corruption Generation Competition, upaya membangun Generasi Anti Korupsi melalui apresiasi terhadap karya anti korupsi bagi pelajar dan mahasiswa, MCW bersama dengan terus bergerak institute mengadakan kegiatan lomba esai bagi peserta pelajar dan mahasiswa di Jawa Timur, bertajuk Anti Corruption Generation

Competition ini diikuti oleh 15 peserta dari kategori SMA dan 57 peserta dari kategori mahasiswa.

Membangun Kemandirian Lembaga melalui Media Fundraising. Fundraising merupakan salah satu alternatif pembiayaan mandiri serta kampanye kepada masyarakat dalam menyampaikan pesan gerakan sosial anti korupsi. Pada tahun 2017, Malang Corruption Watch (MCW) telah membuat sistem fundraising yang digunakan sebagai pembiayaan mandiri sekaligus aktivitas kampanye.

Sekolah Anti Korupsi : Pemuda dan Gerakan Kita, Sejak tahun 2008, Malang Corruption Watch memprakarsai berdirinya sekolah anti korupsi. Sebuah pendekatan model pendidikan anti korupsi pertama di Indonesia ini menjadi salah satu pilihan metode gerakan yang paling mujarab untuk menyemai gerakan anti korupsi. Berlangsung ringan dan nonformal, dengan sistem kaderisasi berjenjang Malang Corruption Watch melakukan inovasi terkait pelaksanaan sekolah anti korupsi dengan berbagai penyesuaian. Pada tahun 2017, MCW

melakukan dua bentuk Sekolah Anti Korupsi yakni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Terpusat dan Sakti On Campus. Kedua program ini memiliki dua pendekatan berbeda. Bila SAKTI terpusat sebagai pencetak relawan kader di Malang Corruption Watch, sementara pada pelaksanaan SAKTI ON Campus merupakan kerjasama dengan organisasi mahasiswa intra kampus untuk membangun model sebuah pelatihan secara berkelanjutan

Pada informan kedua yaitu bahwa Komisi Yudisial dengan data penelitian mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Kegiatan berupa gerakan anti korupsi dalam hal mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim dengan mengadakan pemantauan sidang khusus perkara tipikor pada tahun 2014 yakni pada

1. Perkara nomor 50/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY dengan terdakwa Yudi Setiawan pada perkara pembobolan Bank Jabar- Banten. Pemantauan dilakukan sebanyak dua kali pada

agenda pemeriksaan saksi. Dasar pemantauan ini adalah inisiatif atas Komisi Yudisial Penghubung Jawa timur.

2. Perkara nomor 49/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY dengan terdakwa Yudi Setiawan pada Perkara Pembobol Bank Jatim yang dipantau tiga Kali pada agenda pemeriksaan saksi dengan dasar pemantauan inisiatif Komisi Yudisial Penghubung Jawa timur

Sementara pemantauan sidang khusus perkara tipikor pada tahun 2015 yakni pada:

1. Perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dengan terdakwa Umul Chasanah S.Pd. MM pada perkara Korupsi dana Parsel Pegawai Dinas Pendidikan (Dispen) Pemerintah Kota Probolinggo, dengan dipantau sebanyak tiga Kali pada agenda pemeriksaan saksi dengan dasar pemantauan Penugasan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dan petugas pemantau adalah dari Komisi Yudisial

Republik Indonesia Penghubung
Jawa Timur.

2. Perkara nomor 43/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dengan terdakwa Anang Prihartono pada perkara Korupsi dana Parsel Pegawai Pendidikan (Dispen) Pemerintah Kota Probolinggo yang dilakukan pemantauan sebanyak tiga kali dengan agenda pemeriksaan saksi dengan dasar pemantauan Penugasan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dan petugas pemantau adalah dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Jawa Timur
3. Perkara nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dengan terdakwa Drs. Imam Suwoko, M. Si pada perkara Korupsi dana Parsel Pegawai Pendidikan (Dispen) Pemerintah Kota Probolinggo dilakukan pemantauan sebanyak tiga Kali pada agenda pemeriksaan saksi dengan dasar pemantauan Penugasan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dan petugas pemantau adalah dari Komisi Yudisial

Republik Indonesia Penghubung
Jawa Timur

Pemantauan sidang khusus perkara tipikor pada tahun 2016 yakni pada Perkara nomor 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby dengan terdakwa Yusak bin Muhye dan Bambang Santoso bin Sali pada perkara Pungutan program Prona Desa Tulungrejo Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, yang dilakukan pemantauan sebanyak empat kali pada agenda pemeriksaan saksi, pledoi dan tuntutan dengan dasar pemantauan adalah menindaklanjuti laporan masyarakat yang diajukan oleh masyarakat pada Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Jawa Timur.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), maka hal ini dilakukan dengan mengadakan pemantauan sidang khusus perkara tipikor pada tahun 2017 dalam rangka yakni pada Perkara nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY dengan terdakwa Dahlan Iskan pada Perkara pelepasan

aset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jatim yang dilakukan pemantaun sebanyak 10 Kali dengan agenda pemeriksaan saksi dan putusan, dan petugas pemantau adalah dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Jawa Timur.

KESIMPULAN

Malang Corruption Watch (MCW) telah mengimplementasikan gerakan anti korupsi pada tahun 2016 dengan fokus kerja pada pendidikan publik dan peningkatan kapasitas pemuda dan mahasiswa, sementara pada tahun 2017 adalah lebih memfokuskan pada pendidikan politik rakyat melalui sekolah rakyat forum warga. kemudian membangun kemandirian melalui koperasi. lalu adanya kelompok warga mengawal pelayanan publik serta mengkampanyekan gerakan antikorupsi melalui bioskop warga. beberapa aksi warga dalam melawan korupsi serta melibatkan dunia digital menjadi arus utama informasi, juga *anti corruption generation competition* dengan membangun generasi anti korupsi serta membangun kemandirian lembaga

melalui media fundrising dan pembentukan sekolah antikorupsi bertajuk pemuda dan gerakan kita. Sementara Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung Jawa Timur mengimplementasikan gerakan anti korupsi dengan melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam mewujudkan hakim yang berkomitmen untuk melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim dengan mengadakan pemantauan sidang khusus perkara tipikor pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 14 kali sedangkan Kegiatan berupa gerakan anti korupsi dalam hal mewujudkan untuk menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan mengadakan pemantauan sidang khusus perkara tipikor pada tahun 2017 sebanyak 10 kali.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan. Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta. <https://kbbi.web.id/integritas>, diakses tanggal 27 Oktober 2017.
- Bertin. *Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/152071-ID-fungsi-pengawasan-komisi-yudisial-terhad.pdf>.
- Fahdian Rahmandani, Samsuri, *Malang Corruption Watch Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Guna Membangun Budaya Anti-Korupsi Di Daerah*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya - Vol. 21 No. 01, June 2019. [jurnalanthropologi.fisip.unand.ac.id > index.php > jantro > article > download](http://jurnalanthropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/download)
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Integritas*.